

ETIKA BERPOLITIK PEMIMPIN MASA LAMPAU BERBASIS NASKAH SUNDA

Elis Suryani Nani Sumarlina, Rangga Saptya Mohamad Permana, Undang Ahmad D
Universitas Padjadjaran
elis.suryani@unpad.ac.id, rangga.saptya@unpad.ac.id, undang.a.darsa@unpad.ac.id

Abstrak

Benar adanya apabila dikatakan bahwa banyak kesulitan yang dihadapi dalam menggarap naskah-naskah Sunda Kuno. Akan tetapi, harus disadari pula bahwa di dalam sebuah naskah Sunda kuno terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat masa kini. Isi naskah Sunda Kuno mengungkap beragam ilmu yang bisa dijadikan sebagai referensi literasi bagi ilmu lain saat ini, yang berkaitan dengan historiografi tradisional, toponimi, pandangan hidup, sistem pemerintahan atau pembagian kekuasaan, konsep kepemimpinan, etika berpolitik, dan unsur-unsur kebudayaan lainnya, sebagai bahan dalam upaya menggali, identitas masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Dengan demikian, upaya penggalian dan penggarapan naskah-naskah kuno perlu dilakukan secara sungguh-sungguh, intensif, dan berkesinambungan. Teks naskah Sunda kuno yang sangat menarik untuk dibahas dalam tulisan ini berkaitan dengan etika berpolitik para pemimpin atau raja-raja Sunda masa lampau, yang eksistensinya terungkap dalam naskah *Sanghyang Siksakandang Karesian*, *Fragmen Carita Parahiyangan*, *Amanat Galunggung*, dan *Sanghyang Hayu*, yang ditulis pada abad ke-16 Masehi. Etika berpolitik raja-raja zaman dulu berkaitan erat dengan konsep kepemimpinan, sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan, serta karakter dari pemimpin itu sendiri. Dikaji melalui metode penelitian deskriptif analisis, dan metode kajian filologi, komunikasi politik, historiografi tradisional, dan kajian budaya secara multidisiplin. Diharapkan mampu menungkap bagaimana etika berpolitik raja atau pemimpin Sunda masa silam, melalui naskah-naskah Sunda Kuno abad-16, yang akhirnya dapat membuka cakrawala dan wawasan ilmu pengetahuan bagi ilmu-ilmu lain secara multidisiplin.

Kata Kunci: Etika berpolitik, pemimpin masa lampau, naskah Sunda

POLITICAL ETHICS OF PAST LEADERS BASED ON SUNDANESE MANUSCRIPTS

Abstract

It is true when it is said that many difficulties were encountered in working on Old Sundanese manuscripts. However, it must also be realized that in an ancient Sundanese text there are local wisdom values that are beneficial to the life of today's society. The contents of the Old Sundanese manuscripts reveal a variety of sciences that can be used as literacy references for other current sciences, which are related to traditional historiography, toponymy, worldviews, systems of government or distribution of power, the concept of leadership, political ethics, and other cultural elements, as material in an effort to explore, the identity of the supporting community of that culture. Thus, efforts to excavate and work on ancient manuscripts need to be carried out seriously, intensively, and continuously. The ancient Sundanese texts which are very interesting to discuss in this paper relate to the political ethics of past Sundanese leaders or kings, whose existence is revealed in the Sanghyang Siksakandang Karesian, Fragmen Carita Parahiyangan, Amanat Galunggung, and Sanghyang Hayu, which were written in the 19th century. 16th AD. The political ethics of ancient kings were closely related to the concept of leadership, the system of government, and the distribution of power, as well as the character of the leader himself. It is studied through the

analytical descriptive research method, and the multidisciplinary study methods of philology, political communication, traditional historiography, and cultural studies. It is hoped that it will be able to reveal how the political ethics of kings or Sundanese leaders in the past, through 16th-century Old Sundanese manuscripts, which can finally open scientific horizons and insights for other sciences in a multidisciplinary manner.

Keywords: *Political ethics, past leaders, Sundanese manuscripts*

PENDAHULUAN

Pengertian naskah di masa kini, tentu tidak sama dengan istilah naskah di masa lampau, yang merupakan dokumen budaya tinggalan nenek moyang dari suatu bangsa atau suku bangsa tertentu, dikenal sebagai kearifan lokal, yang meliputi aspek kehidupan masyarakat yang menyangkut tujuh unsur budaya. Nilai-nilai moral, pandangan hidup, ide, dan gagasan nenek moyang orang Sunda yang terungkap dalam naskah masih sangat relevan untuk dikenalkan dan diungkap isinya pada masa kini, paling tidak sebagai referensi literasi bagi ilmu lain secara multidisiplin.

Tidak dipungkiri, bahwa penelitian dan pengkajian naskah Sunda di berbagai daerah di Jawa Barat, masih sangat sedikit. Hal itu dapat kita telusuri dari hasil kajian para filolog yang telah dipublikasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Naskah yang masih tersebar secara perseorangan di masyarakat Sunda misalnya, masih banyak yang belum tersentuh tangan para ahli, sehingga isinya pun belum terungkap. Hal ini dapat dipahami, karena untuk menggarap dan mengungkap teks sebuah naskah diperlukan keterampilan aksara, bahasa, budaya, dan ilmu lainnya sesuai dengan isi naskah tersebut (Sumarlina, Permana, et al., 2020b; Sumarlina & Maulidyawati, 2022).

Katalog yang membicarakan naskah Sunda mengungkapkan informasi bahwa ada ratusan naskah Sunda yang ditulis di atas daun lontar, daun nifah, saeh, dan daun kelapa atau sejenisnya, yang diperkirakan berasal dari masa kerajaan Sunda atau paling tidak berasal dari kalangan masyarakat pra-Islam atau awal Islam, yakni naskah-naskah Sunda yang ditulis abad XVI Masehi, beraksara Sunda (Kuno), berbahasa Sunda Kuno, berbahan lontar/nipah atau gebang, serta berkisah tentang kerajaan beserta raja-rajanya di masa itu, ensiklopedia budaya masa lampau, kosmologis, sejarah, sistem pemerintahan, konsep kepemimpinan, etika berpolitik yang merupakan kajian dalam tulisan ini (Darsa & Ekadjati, 2006; Ekadjati & Darsa, 2007; Sumarlina, 2018b; Sumarlina & Permana, 2019).

Naskah Sunda Kuno yang cukup menarik untuk dibahas pada tulisan ini berkaitan dengan teks isi naskah *Sanghyang Siksakandang Karesian, Fragmen Carita Parahiyangan, Amanat Galunggung, dan Sanghyang Hayu*, khususnya yang mengungkap etika berpolitik dan kepemimpinan, yang tentu saja berkaitan erat dengan masalah sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan di negeri kita, selama ini berasal dan mengacu kepada teori Montesque yang dikenal dengan istilah *Trias Politica*, yang terdiri atas *eksekutif, legeslatif, dan yudikatif*. Adakah persamaan dan perbedaannya dengan sistem pemerintahan dan kekuasaan dalam naskah Sunda Kuno Abad ke-16 Masehi (Sumarlina et al., 2021; Sumarlina & Maulidyawati, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian filologi, secara umum meliputi kajian kodikologis dan kajian tekstologis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis komparatif, dimaksudkan untuk mencatat, menuturkan, menafsirkan, menganalisis, serta membandingkan data melalui suatu proses pemahaman yang akan sangat bergantung pada keadaan data dan nilai bahan atau objek penelitian yang digarap. Untuk itu perlu ditempuh langkah-langkah pengumpulan data naskah yang memuat objek data naskah yang dikaji, yang dilaksanakan

berdasarkan informasi hasil studi pustaka, antara lain melalui katalog-katalog naskah (Darsa et al., 2020; Permana et al., 2020; Sumarlina, Darsa, et al., 2020).

Metode kajian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kajian kritik teks secara filologis, baik kodikologis maupun tekstologis, kajian sosial budaya dan kepemimpinan dan komunikasi politik, yang berkaitan dengan unsur-unsur naskah yang di dalamnya mengungkap isi naskah yang berkaitan dengan ide, gagasan, etika, sistem pemerintahan, kepemimpinan, pembagian kekuasaan, dan komunikasi politik para pemangku kebijakan di masyarakat pada saat naskah itu ditulis atau disalin. Pengumpulan sumber data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder, dalam penelitian ini ditempuh dengan cara studi pustaka dan kerja lapangan. Studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kita tahu bahwa kearifan lokal budaya suatu bangsa atau suku bangsa, termasuk budaya Sunda di masa lampau, paling tidak bermanfaat untuk mengungkap ‘tonggak’ suatu kehidupan masyarakat pada masanya. Itu sebabnya, naskah Sunda abad XVI Masehi, terkait dengan konsep pembagian sistem pemerintahan atau kekuasaan, kepemimpinan, dan etika berpolitik masyarakat Sunda di masa lalu, yang terkuak dalam naskah Sunda kuno mampu menguak tabir, sebagai pembentuk kepribadian dan karakter generasi mudanya, agar mereka ikut serta *ngaraksa, ngariksa, tur ngamumule* budaya *pituinnya* ‘aslinya’ sendiri supaya tidak *pareumeun obor* ‘kehilangan jejak’. Andai unsur budaya tersebut dibiarkan serta tidak segera dikenalkan, diungkap, dan dikaji teks/isinya, maka lama kelamaan isi yang terkandung dalam naskah Sund Kuno itu akan musnah ditelan zaman.

Hasil penelitian terhadap naskah Sunda, khususnya terkait dengan etika berpolitik para pemimpin Sunda di masa lampau eksistensinya secara khusus terungkap dalam naskah *Sanghyang Siksakandang Karesian, Fragmen Carita Parahiyangan, Amanat Galunggung, Carita Parahiyangan*, dan *Sanghyang Hayu*, yang ditulis pada abad ke-16 Masehi. Etika berpolitik raja-raja zaman dulu berkaitan erat dengan konsep kepemimpinan, sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan, serta karakter dari pemimpin itu sendiri (Sumarlina, 2019; Sumarlina & Permana, 2019).

Pembahasan

Etika Berpolitik Berbasis Konsep Kepemimpinan Sunda

Etika berpolitik, dalam prakteknya tidak terlepas dari kepemimpinan seseorang, di mana hal itu pun bergantung pula kepada karakter pemimpin itu sendiri. Dalam naskah *Sanghyang Siksakandang Karesian*, kepemimpinan Sunda dikenal dengan istilah *parigeuing*, yakni kepemimpinan dengan segala kebesaran, kearifan, serta karakter dari sosok pemimpin kharismatik. *Parigeuing* mengungkap pesan moral dan petuah berharga, tentang bagaimana mengingatkan/*ngageuing batur* ‘mengingatkan orang lain’ tanpa terasa, untuk mencapai tujuan bersama, yang sangat penting dalam upaya bernegosiasi dan beretika dalam berpolitik (Charliyan, 2015; Thoha, 2013).

Karakter dan gaya atau cara kepemimpinan seseorang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seorang pemimpin. Cara atau gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat (Charliyan & Sumarlina, 2009; Sumarlina & Darsa, 2022; Thoha, 2013).

Naskah *Sanghyang Siksakandang Karesian (SSK)* mengungkapkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat *Dasa prasanta* ‘sepuluh sifat baik untuk memengaruhi orang lain’, yang sangat bermanfaat dalam upaya menjalin hubungan baik dengan mitra atau pihak

lain dalam berpolitik. Sifat *Dasa Prasasta*, meliputi *Asih* ‘sayang’, *Guna* ‘bijaksana’, *Hook* ‘kagum’, *Karunya* ‘iba’, *Mupreruk* ‘membujuk’, *Ngala angen* ‘mengambil hati’, *Nyecep* ‘membesarkan hati’, *Ngulas* ‘memuji dan mengoreksi’, *Pésok* ‘memikat hati’, dan *Ramah* ‘bijak’. Di samping itu, seorang pemimpin, dituntut memiliki pelengkap kharisma, yang dalam naskah *Sanghyang Siksakandang Karesian (SSK)* disebut *pangimbuhning twah*, bahwa pemimpin itu harus *Cangcingan* ‘terampil’, *Emét* ‘tidak konsumtif’. *Gapitan* ‘berani berkorban’, *Imeut* ‘teliti, cermat’, *Karawaléya* ‘dermawan’, *Langsitan* ‘cekatan’, *Leukeun* ‘tekun’, *Morogol-rogol* ‘beretos kerja tinggi’, *Paka Pradana* ‘beretika’. *Purusa ning Sa* ‘berjiwa pahlawan’, *Rajeun* ‘rajin’, dan *Widagda* ‘bijaksana’ (Charliyan, 2015; Permana et al., 2020; Sumarlina, 2019).

Untuk melengkapi etika berpolitik, seorang raja atau pemimpin pada umumnya menurut naskah *Sanghyang Hayu (SH)* harus menjiwai konsep ‘tiga rahasi’, agar berhasil dalam usahanya, meliputi *Budi-Guna-Pradana* (bijak-arif, berguna, dan memiliki kesalehan sosial), *Kaya-Wak-Cita* (kuat, sehat, memiliki hati nurani), *Pratiwi-Akasa-Antara* (melindungi bumi–angkasa-antara), *Mata-Tutuk- Talinga* (menjaga penglihatan-ucapan-pendengaran), *Bayu-Sabda-Hedap* (memiliki energibaik–menjaga ucapan/sabda, dan memiliki itikad baik, kalbu dan pemikiran yang luas) (Permana, 2015b; Sumarlina, 2019; Widyonugrahanto et al., 2017).

Naskah *Sanghyang Hayu* pun mengungkapkan bahwa seorang pemimpin dituntut memiliki prinsip *astaguna*, yakni memiliki delapan kearifan’, yakni, *Animan* (bersifat lemah lembut), *Ahiman* (bersifat tegas), *Mahiman* (berwawasan luas), *Lagiman* (bersikap gesit), *Prapti* (tepat sasaran), *Prakamya* (memiliki sifat ulet), *Isitwa* (bersikap jujur), dan *Wasitwa* (memiliki sifat terbuka untuk dikritik). Semua prinsip *Astaguna* tersebut merupakan etika yang akan mendukung ke arah berpolitik.

Berkaitan dengan etika berpolitik, seorang raja sebagai pemimpin selain harus memiliki sifat dasa prasasta, *pangimbuhning twah*, dan menjiwai konsep tiga rahasia, pemimpin harus menjauhi empat karakter buruk atau negatif, yang disebut *opat paharaman* ‘empat hal yang diharamkan’, yakni buruk *babarian* ‘mudah tersinggung’, *pundungan* ‘mudah merajuk’, *humandeuar* ‘berkeluh kesah’, dan *kukulutus* ‘menggerutu’, serta menjauhi watak manusia yang membuat kerusakan di dunia atau *Catur Buta*, yaitu *Burangkak*, *Maréndé*, *Mariris*, dan *Wirang*.

Etika berpolitik Raja Sunda atau Pemimpin Sunda dalam rangka melaksanakan politiknya, tidak terlepas dari karakter dan *pangombuhning twah* yang mereka miliki. Upaya negosiasi dan berpolitiknya seorang pemimpin diharapkan menunjukkan kemampuannya menghindari empat larangan, yakni ‘jangan berteriak’ (*mulah kwanta*), ‘jangan suka menyindir orang lain (*mulah majar laksana*), ‘jangan menjelekkan orang lain (*mulah madahkeun pada janma*)’, dan ‘jangan berbohong’ (*mulah sabda ngapus*). Selain itu, dalam menjalankan etika berpolitiknya, seorang pemimpin harus mampu menjaga *dasakreta* sebagai perwujudan *dasaindra*, yakni harus menjaga mata, telinga, kulit, lidah, hidung, mulut, tangan, kaki, badan, dan aurat., akan tercapai apa yang diharapkannya.

Etika berpolitik seorang pemimpin dalam naskah *Amanat Galunggung (AG)*, harus bercermin kepada *élmu patanjala* ‘ilmu wujud air’, yakni: *mulah kasimuratan* ‘jangan mudah terpengaruh’, *mulah kasiwuran kanu miburungan tapa* ‘jangan peduli terhadap godaan, dan *mulah kapidéngé kanu carék goréng* ‘jangan dengarkan ucapan yang buruk’. Menurut naskah *AG*, seorang pemimpin itu harus *siniti* ‘bijak’, *siniyagata* ‘benar’, *siaum* ‘adil dan takwa’, *sihoooh* ‘serius’, *sikarungrungan* ‘simpatik’, *semuguyu* ‘ramah’, *téjah ambek* ‘rendah hati’, dan *guru basa* ‘mantap bicara’. Pemimpin ideal harus berperilaku sebagai abdi, yakni: *mulah luhya* ‘jangan mudah mengeluh’, *mulah kuciwa* ‘jangan kecewa’, *mulah ngontong dipiwarang* ‘jangan sulit diperintah, *mulah hiri* ‘jangan iri’, dan *mulah dengki* ‘jangan dengki’.

Keterjalinan Etika Berpolitik dengan Karakter Orang Sunda

Etika berpolitik dilakukan oleh seorang pemimpin, sesuai dengan ide, pemikiran, norma atau aturan, serta perilaku kepemimpinannya. Hal ini terjadi, karena dasar kepemimpinan bergantung kepada kemampuan karakter pemimpin itu sendiri dalam berinteraksi sosial dan bernegosiasi dengan pihak lain untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama. Etika berpolitik seorang pemimpin dapat berorientasi kepada hubungan yang harus dibina dengan pihak lain atau kelompoknya (*concern for people*) yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai (*concern for production*). Etika dan faktor tersebut perlu diperhatikan oleh seorang pemimpin dalam berpolitik (Charliyan, 2015).

Etika berpolitik yang dilakukan oleh raja-raja Sunda atau pemimpin di masa lampau, sebagaimana terungkap dalam naskah Sunda kuno, meliputi aspek IQ (*Intellectual Quotient*), EQ (*Emotional Quotient*), SQ (*Spiritual Quotient*), dan AQ (*Actional Quotient*) sebagai sinergi pragmatiknya (Charliyan, 2015; Sumarlina, 2012; Suryalaga, 2009). Berhasil tidaknya bernegosiasi dengan pihak lain, bergantung kepada aspek tersebut di atas, seperti yang dilakukan oleh Prabu Surawisesa, yang dikenal ulung dalam berpolitik, tatkala bernegosiasi dengan kerajaan lain.

Etika berpolitik berkaitan erat dengan karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin, tentu saja tiap pemimpin tidak sama karakternya. yang meliputi: *cageur*, *bageur*, *bener*, *pinter*, *singer*, *teger*, *wanter*, dan *tajeur*. *Cageur* AQ dan PQ (*Physical Ability*) diartikan tidak sedang terkena penyakit, sehat atau sudah/baru sembuh. Seorang pemimpin harus sehat, kuat, enerjik, dan senantiasa bertindak dengan hati.

Bageur, adalah sifat pemimpin yang suka memberi, baik perilakunya. Seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya harus beretika dengan mengimplementasikan sikap *animan* (lemah lembut), tidak berperilaku kasar. Etika pemimpin harus berperilaku arif bijaksana dan saleh, di samping bijak dalam memandang segala hal serta ramah, *karawaléya* 'dermawan'. Kesalehan sosial sangat diperlukan dari seorang pemimpin, berhubungan dengan *Emotionality Ability/EQ*.

Bener 'benar', tidak berbuat salah. Seorang pemimpin harus lurus dan menjunjung tinggi kebenaran, memiliki sifat jujur atau *isitwa*, baik dalam perkataan, pemikiran, maupun perbuatan agar dipercaya oleh orang lain, sehingga terjalin kesepahaman yang harmonis. Etika berpolitik seorang raja atau pemimpin zaman dahulu harus *saciduh metu saucap nyata*, 'adanya kesepahaman antara pikiran, perasaan, dan tindakan' agar dipercaya oleh orang lain. Apa yang dilihat, dan didengar harus sesuai dengan apa yang diucapkan. Hal ini selaras dengan *Moral Ability* atau SQ. Sementara itu, *pinter* 'pintar'/pandai, dapat dipahami bahwa seorang pemimpin itu selain harus beretika, juga berpengetahuan, mampu bekerja, mudah mengerti. Pemimpin sudah selayaknya memiliki berbagai macam pengetahuan dan berwawasan tinggi. Pemimpin selain *pinter* 'cerdas' juga harus memiliki keseimbangan rasa dalam bertindak, menyangkut *Intellectual Ability (IQ)*.

Singer 'trampil, gesit, cekatan', *langsitan* 'rapekan', segala bisa, multi talenta dan pro aktif. *Rajeun* 'rajin'. Selama hidupnya tetap berkarya. *Morogol-rogol* 'bersemangat, beretos kerja tinggi'. Keinginannya untuk berkarya dengan kualitas unggul dan terbaik, berkenaan dengan *Personal Ability (PQ)*. *Teger* 'tidak takut dan tidak khawatir sedikit pun'. *Panceg haté* 'tidak plin plan', kalem dan berpendirian. Seorang pemimpin harus tegas dan *leukeun* 'ulet/tekun'. Ketekunan dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan dengan penuh kesabaran. Pemimpin tidak boleh putus asa dalam menghadapi segala kondisi. Teger berkaitan dengan terbuka untuk dikritik, 'legowo' dan bijaksana serta terbuka untuk dikritik, selaras dengan *Reliance Ability (RQ)*.

Tajeur/tanjeur 'mampu berdiri kokoh di atas kaki sendiri'. Pemimpin harus tepat sasaran; memiliki ketajaman berpikir, karena jika keliru atau berspekulasi hal itu akan menghambat suatu pekerjaan, menyangkut *Exelent Ability (ExQ)*. *Wanter* 'berani tampil

dalam kondisi apapun'. *Wanter* harus *purusa ning sa* 'berjiwa pahlawan, jujur, berani'. Kreatif dan inovatif. Para pembaharu yang berani menantang kemandegan pemikiran manusia. *Widagda* 'bijaksana, rasional dan memiliki keseimbangan rasa'. *Paka Pradana* 'berani tampil sopan, beretika'. *Gapitan* 'berani berkorban untuk keyakinan dirinya'. Kedelapan karakter orang Sunda dimaksud akan melahirkan *manusa unggul (maung)* yang ulet dan tangguh, sehingga melahirkan konsepsi ketahanan pribadi/nasional.

Keterjalinan Etika Berpolitik dengan Sistem Pemerintahan dan Pembagian Kekuasaan

Etika berpolitik para raja dan pemimpin Sunda di masa silam sangat berkaitan erat dengan Sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan, sebagaimana terungkap dalam naskah *Pragmen Carita Parahiyangan* dan sedikit ulasan dalam naskah *Sanghyang Siksakandang Karesian*, yang dikenal dengan sebutan *Tri Tangtu di buana* 'tiga unsur penentu kehidupan di dunia'. Ketiga unsur dimaksud terdiri atas *Prabu*, *Rama* dan *Resi*. *Prabu* adalah pemimpin roda pemerintahan (eksekutif yang saat ini dipegang oleh pemerintah, dalam hal ini presiden) yang harus *ngagurat batu* 'berwatak teguh'. *Rama* adalah golongan yang dituakan sebagai wakil rakyat (legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat) yang harus *ngagurat lemah* 'berwatak menentukan hal yang mesti dipijak'. *Resi* adalah golongan yang bertugas memerdayakan hukum agama dan *darigama* 'negara' (yudikatif atau saat ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Alim Ulama) yang harus *ngagurat cai* 'berwatak menyejukkan dalam peradilan'. Ketiga unsur di atas dilaksanakan sesuai dengan keahlian politik para pemimpinnya. Karena berhubungan dengan berhasil tidaknya taktik dan etika politik itu dijalankan.

Keterjalinan etika berpolitik raja dan para pemimpin di masa lalu tersebut bisa dilihat dari pelaksanaan dan pemberlakuan sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan yang digunakan, sebagaimana tampak dalam naskah *Fragment Carita Parahiyangan*, hingga saat ini masih bisa kita lihat melalui sistem pembagian kekuasaan di masyarakat Baduy (Kanékés), yang dipimpin oleh tiga *kapuunan* 'kepuanan', yakni *Puun Cikeusik*, *Puun Cikartawana*, dan *Puun Cibéo*. *Tri Tangtu di Buana* dalam masyarakat Baduy, unsur *prebu* atau yang bertindak sebagai pemimpin roda pemerintahan (*eksekutif*) dipegang oleh *Puun Cibéo*. *Rama* sebagai golongan yang dituakan atau wakil rakyat (*legislatif*) dipegang oleh *Puun Cikartawana*. Sedangkan *Resi* yang bertugas memberdayakan hukum agama dan *darigama* 'negara' (*yudikatif*) dipegang oleh *Puun Cikeusik* (Permana, 2015a, 2016; Sumarlina, Permana, et al., 2020a).

Peran dan fungsi etika berpolitik dalam sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan berfungsi dengan baik dan harmonis, sebagaimana diimplementasikan di masyarakat adat Baduy. Adanya pembagian peran dan fungsi yang selaras antara *Prabu*, *Rama*, dan *Resi* bersinergi dan saling membantu, tidak saling intervensi dan tidak bertolak belakang satu sama lain. Di samping itu, ketiga unsur tersebut dalam hal-hal tertentu saling menghormati satu sama lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pihak *Prabu* tidak akan ikut campur terhadap kekuasaan *Rama* dan *Resi*, demikian juga sebaliknya. Namun untuk membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dan adat istiadat juga tradisi dan kepercayaan dalam komunitas politik di Baduy, ketiganya senantiasa berembug dan bermufakat untuk kebaikan bersama.

Sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan masyarakat Baduy, pada dasarnya hampir sama dengan sistem pembagian kekuasaan dan pemerintahan di Kampung Naga, yang meliputi tiga pembagian kekuasaan, di mana etika berpolitiknya pun sama tiga, hanya nama dan fokusnya saja yang berbeda. Sistem pembagian di masyarakat Kampung Naga meliputi *tatawilayah* 'wilayah', *tatawayah* 'waktu', dan *tatalampah* 'perilaku', yang satu sama lain saling berkaitan, dan tidak bisa dipisahkan. *Tatawilayah* dihubungkan dengan situasi dan kondisi tempat atau wilayah Kampung Naga yang terbatas, dan tidak bisa ditambah atau

dikurangi, baik lahan, jumlah keluarga, maupun jumlah bangunannya. *Tatawayah*, segala kehidupan yang berkaitan dengan mata pencaharian hidup dan kehidupan lainnya, yang harus sesuai dengan waktunya. Kapan waktu untuk menanam padi, berdagang, dan melaksanakan *hajat sasih*, kegiatan yang berkaitan dengan upacara keagamaan yang berkaitan dengan adat, tradisi, dan budaya. Sedangkan *tatalampah*, adalah bahwa perilaku manusia sebagai anggota masyarakat harus diimplementasikan dalam segala aspek kehidupan sehari-hari, yang berkaitan dengan adat, tradisi, budaya, yang tidak melanggar agama dan keyakinan yang mereka anut (Charliyan & Sumarlina, 2009; Sumarlina, 2018a; Sumarlina, Permana, et al., 2020a).

Etika berpolitik yang berlangsung dalam sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan di Baduy dan di Kampung Naga serta masyarakat adat Sunda lainnya, merupakan salah satu penjelmaan dari sistem pemerintahan masyarakat Sunda masa lampau, sebagaimana tercermin dalam naskah Naskah *Pragmen Carita Parahiyangan* dan *Sanghyang Siksakandang Karesian*, yang mampu memberikan gambaran bahwa masyarakat Tatar Sunda di masa silam telah memiliki satu taraf kehidupan sosial yang cukup teratur. Hal ini pun membuktikan bahwa kecerdasan Nenek Moyang orang Sunda jaman dahulu tidak kalah pandai dan mampu melebihi kecerdasan masyarakat lainnya, karena *Karuhun Orang Sunda* telah menggunakan sistem pembagian kekuasaan dan kepemimpinan sejak abad ke-15 dan 16 Masehi.

Sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan, berkaitan erat dengan etika berpolitik dan figur seorang pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin mampu mengadakan diplomasi kenegaraan dengan negara lain. Hal ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Kepemimpinan seorang pemimpin dapat dilihat dari keberhasilannya bersosialisasi dan mengadakan kerja sama pemerintahan dengan pihak lain. Kedamaian pun menjadi tolak ukur kepemimpinan. Kerja sama antarnegara tidak akan berjalan lancar jika tidak mampu menjaga kedamaian.

Etika dan Komunikasi Politik Berbasis Naskah Sunda

Etika berpolitik Raja Sunda atau para pemimpin di masa lampau, sudah dilakukan sejak dahulu, yang terkuak lewat naskah Sunda kuno dan tradisi lisan. Bukan tidak ada alasan, mengapa Gong Perdamaian Dunia diletakkan di kawasan wisata Karang Kamulyan Ciamis? Secara historis maupun folklor yang berkembang di sekitar Karang Kamulyan, juga kaitannya dengan kabuyutan serta prasasti Kawali Kabupaten Ciamis. Salah satunya selain sejalan dengan visi dan misi awal dari pembuatan ‘Gong Perdamaian Dunia’ itu sendiri, juga adanya keterkaitan antara pertikaian antara Ciung Wanara dan Hariyang Banga (keduanya saudara se bapak lain ibu), ternyata dapat didamaikan oleh ‘Sang Prabu’ (ayah kandung mereka sendiri) yang menyamar menjadi seorang ‘kakek’ yang menasehati keduanya, sebagaimana terungkap dalam tradisi lisan Karang Kamulyan dan *Carita Ciung Wanara*. Hal ini merupakan perwujudan dari etika politik masyarakat Sunda yang tertuang dalam naskah.

Andai kita cermati dari sudut pandang etika berpolitik, pertikaian antara Ciung Wanara dan Hariyang Banga (dalam versi lain disebut Sanjaya) merupakan satu-satunya perkelahian pada masa silam, yang mampu ‘didamaikan’, tidak seperti pertikaian yang lain yang selalu berakhir dengan kehancuran tanpa perdamaian. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan tujuan didirikannya Gong Perdamaian Dunia di Karang Kamulyan Ciamis. Hal ini jika kita simak, merupakan salah satu etika berpolitik seorang pemimpin Sunda yang sangat hebat.

Etika berpolitik raja atau pemimpin Sunda yang tercermin dalam Prasasti Kawali 1 hingga 6, merupakan amanat Prabu Niskalawastukancana, yang ditujukan kepada rakyatnya, yang dianggap sebagai raja dan pemimpin yang memiliki etika berpolitik yang sangat hebat, mumpuni, adil bijaksana, disegani serta dicintai rakyatnya. Di masa pemerintahannya, Beliau merupakan salah satu raja yang mampu berdiplomasi dan berpolitik yang luar biasa,

sehingga raja-raja dari kerajaan lain sangat hormat dan mengaguminya. Beliau telah mampu *ngretakeun urang reya* ‘memerdayakan & menyejahterakan orang banyak’ dan *ngretakeun bumi lamba* ‘menyejahterakan alam dunya’ (menurut *Sanghyang Siksakandang Karesian*), sehingga Beliau termasuk salah satu raja besar Sunda yang digelar Prabu Siliwangi (raja yang harum namanya).

Amanat dan pesan moral yang tersirat dalam prasasti Kawali, bukan hanya memberi makna kesejahteraan, kearifan, kejujuran, dan kerukunan hidup, namun juga kedamaian serta kesatuan berbangsa, bernegara, serta beragama, yang merupakan etika berpolitik dari seorang raja besar pada masanya. Tuntunan moral yang Beliau ungkapkan lewat amanat bagi anak cucu dan rakyatnya yang mendiami Kawali serta Galuh (Ciamis sekarang) masih sangat relevan bagi kehidupan masa kini, salah satunya adalah bahwa kita sebagai manusia tidak boleh serakah jika tidak ingin sengsara di kemudian hari “*ulah botoh bisi kokoro*” sebagaimana terungkap lewat Prasasti Kawali 6. Keserakahan tersebut bukan hanya terbatas pada materi semata, tetapi lebih kepada semua hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Salah satu bukti adanya etika berpolitik di masa lampau yang dilakukan oleh para raja atau pemimpin pada masanya, adalah Gong Perdamaian Dunia yang ada di Karang Kamulyan, yang ada kaitannya dengan sejarah perdamaian masa silam di Keraton Galuh Pakwan antara pemimpin atau wakil dari beberapa kerajaan, termasuk dari Galuh dan Medang Mataram Kuno yang berlangsung pada tahun 740 Masehi. Perdamaian di Galuh Pakwan terlaksana, berkat adanya etika politik dan kewibawaan Sang Resiguru Demunawan, yang mampu menghentikan konflik di Galuh, walaupun saat itu baru saja tiba pasukan Bhairawamamuk dan pasukan Bhatarakroda dari Medang Mataram.

Etika berpolitik Raja Sunda dan keberhasilan serta inisiatif pimpinan Sang Resiguru Demunawan atau Seuweukarma diadakanlah musyawarah di istana Galuh Pakwan, antara para raja dan utusannya dari kedua belah pihak. Hasil dari kesepakatan dan musyawarah tersebut didapatkanlah sepuluh kesepakatan, dalam bentuk perjanjian. Ditulis pada tahun 661 Saka bulan Phalguna tanggal 15 paroterang atau 8 Maret 740 Masehi (Darsa et al., 2000). Etika berpolitik, kedamaian, kebajikan, kejujuran, keutuhan dan persatuan bangsa serta kerukunan beragama, layak untuk diabadikan dalam upaya memelihara keutuhan dan persatuan umat, Hal ini tidak lain agar *nonoman Sunda* ‘generasi muda Sunda’ tidak ‘kehilangan jejak’ serta kehilangan jati dirinya.

Isi perdamaian tersebut yang merupakan etika politik dan kesepakatan bersama, yaitu: 1) Permusuhan di antara kedua belah pihak diakhiri; mereka saling memaafkan, saling menolong, saling membantu, dan bersahabat; 2). Tidak boleh melakukan pembalasan di antara mereka, karena berasal dari satu nenek moyang; semua anggota kesatuan bersenjata yang tertawan dibebaskan; 3) Apabila terjadi pertentangan di antara mereka hendaklah diselesaikan secara damai melalui perundingan; hubungan kekerabatan di antara mereka janganlah putus; janganlah satu negeri menundukan negeri yang lainnya; hendaklah saling mengasihi dan saling menyayangi; 4) Raden Kamarasa alias Rahiyang Banga (cucu Sang Sanjaya) diangkat menjadi Raja Sunda dengan gelar Prabhu Kretabhawana Yasawiguna Hajimulya yang bertahta di Pakwan Pajajaran; wilayah kekuasaannya ialah dari Sungai Citarum ke sebelah barat; 5) Raden Sorottoma alias Rahiyang Manarah diangkat menjadi Raja Sunda dengan gelar Prabhu Jayaprakosa Mandhaleswara Sakalabhawana yang bertahta di Galuh Pakwan; wilayah kekuasaannya ialah dari Sungai Citarum ke sebelah timur (Darsa, 1998; Sumarlina & Darsa, 2022).

Etika berpolitik dalam perjanjian selanjutnya 6) Resiguru Demunawan menjadi Prabhu Resiguru Saunggalah di bumi Galuh Pakwan. Saunggalah menjadi daerah bebas pajak, daerah agama, daerah merdeka; Sang Sanjaya tetap menjadi raja Medang di bumi Mataram. Putra ke-2 Sang Jatmika alias Rahiang Sempakwaja (petinggi kaum *rama* di

Kabataraan Galunggung); 7) Perdagangan dan penangkapan ikan dizinkan secara terbuka; penjagaan pantai laut dilakukan oleh angkatan bersenjata masing-masing dan tapal batasnya dijaga secara bersama; 8) Tempat-tempat peribadatan keagamaan dan tempat penyembahan harus dihormati bersama-sama, termasuk semua benda yang diperlukan dalam upacara peribadatan; 9) Adat kebiasaan warga masyarakat pribumi setempat harus dilindungi; 10) Wilayah tempat tinggal Resiguru Demunawan harus dihormati oleh mereka; janganlah ada yang berkhianat terhadap perjanjian kaum keluarga ini (Darsa, 2019).

Dalam surat kesepakatan atau perjanjian dari beberapa pemimpin dan ditandatangani oleh empat orang petinggi kerajaan, yakni Resiguru Demunawan, Sang Sanjaya, Sang Manarah, dan Sang Banga, dapat dianggap sebagai implementasi atau perwujudan etika berpolitik raja atau pemimpin Sunda masa lampau berbasis naskah Sunda kuno. Sementara itu, turut menandatangani sebagai saksi ialah 7 orang pembesar kerajaan; yang terdiri atas 4 orang pejabat pemerintahan, masing-masing bernama Sang Panangkaran, Patih Balangantrang, Sang Kretayudha, Panglima Langlangsebrang; dan 3 orang pejabat agama, yaitu *Sang Dharmādyaksa* agama: Siwa, Wisnu, dan Budha (Darsa, 2019).

Sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan tidak terlepas dari etika berpolitik seorang pemimpin. Figur seorang pemimpin dalam menjalankan hubungan dengan negara lain pun dapat menentukan berhasil tidaknya pemerintahan yang dijalkannya. Konsep kepemimpinan yang disertai etika berpolitik dari seorang pemimpin, akan menimbulkan kedamaian dan rasa aman bagi rakyatnya.

Salah satu bukti adanya perdamaian zaman dahulu di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, tampak pada keberadaan Gong Perdamaian Dunia yang berada di Karang Kamulyan, sebagai salah satu *patilasan* Kerajaan Galuh, dan Kabuyutan Kawali. Hal itu sebagaimana terungkap lewat amanat dan pesan Prabu Niskalawastu Kancana, seperti tersirat lewat Prasasti Kawali dan Prasasti Batu Tulis Bogor. Tinggalan budaya yang tidak kalah pentingnya adalah naskah-naskah Sunda Kuno, berbahan *Lontar*, *nipah*, maupun *Saeh*, beraksara dan berbahasa Sunda Kuno.

SIMPULAN

Etika berpolitik para raja Sunda masa lampau berkaitan erat dengan konsep *parigeuing* 'kepemimpinannya' yang terungkap dalam Naskah Sunda Kuno abad XVI Masehi, berkelindan erat dengan Pemimpin sebagai master, yakni pemimpin yang sudah mumpuni & legendaris, yang menurut *SKK* adalah pemimpin yang dalam kepemimpinannya memiliki sifat *Dasa prasanta*, serta pemimpin yang dalam pribadinya sudah melekat karakter kepemimpinan yang disebut *pangimbuhning twah* untuk mempunyai *tuah/kharisma/pamor* serta menjiwai konsep '*tiga rahasia*', agar berhasil dalam usahanya.

Pemimpin sebagai *tokoh*, adalah pemimpin yang menjauhi empat karakter yang negatif agar kepemimpinannya berkharisma, yang dikenal dengan sebutan '*opat paharaman*' atau empat hal yang diharamkan, sebagai pedoman etika berpolitik masa silam. Etika berpolitik Sunda harus menjadi dasar para pemimpin yang harus menjauhi *Catur Buta*. Kepemimpinan berkelindan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, yang harus diejawantahkan oleh seorang pemimpin dalam kepemimpinannya. Sikap dan perilaku orang Sunda sebagai etika dalam berpolitik harus dimiliki oleh seorang pemimpin sebagaimana terungkap dalam naskah Sunda Kuno, meliputi kriteria: *cageur*, *bageur*, *pinter*, *bener*, *singer*, *teger*, *wanter*, dan *tajeur*. sehingga kepemimpinannya berjalan selaras, baik, dan harmonis, yang mampu memerdayakan, mencerdaskan, serta menyejahterakan kehidupan orang banyak dan alam dunia, yang disegani, dikagumi, dan dicintai rakyatnya "*ngretakeun urang réya*", dan mampu "*ngretakeun bumi lamba*" 'menyejahterakan alam dunia'. Pemimpin ideal seperti itulah yang didamba masyarakat Indonesia masa kini dan masa mendatang.

Kedamaian, kebajikan, kejujuran, kearifan, keutuhan dan persatuan bangsa serta kerukunan beragama, yang tersimpan dalam naskah Sunda Kuno, layak untuk digali, diteliti dan dikaji, serta dikembangkan dan diabadikan dalam upaya memelihara keutuhan dan persatuan umat, agar generasi muda Sunda tidak kehilangan jejak serta kehilangan jati dirinya. Sudah sepatutnya kita mengenalkan kembali tinggalan dan sejarah nenek moyang orang Sunda masa lampau, agar *jati diri* orang Sunda tetap lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- Charliyan, A. (2015). *Master Leadership*. Solusi Publishing.
- Charliyan, A., & Sumarlina, E. S. N. (2009). *Parigeuing Kepemimpinan Ala Sunda*.
- Darsa, U. A. (1998). *Sanghyang Hayu: Naskah Jawa Kuno di Sunda*. Universitas Padjadjaran.
- Darsa, U. A. (2019). Raja-raja Sunda dan Siliwangi dalam Lintas Tradisi Kepustakaan Mandala. In R. S. M. Permana (Ed.), *Aspek Budaya Nusantara dalam Perspektif Bahasa, Sastra, Sejarah, dan Filologi* (pp. 1–18). PT. Raness Media Rancage.
- Darsa, U. A., & Ekadjati, E. S. (2006). *Gambaran Kosmologi Sunda*. Kiblat Buku Utama.
- Darsa, U. A., Sofianto, K., & Sumarlina, E. S. N. (2000). Tinjauan Filologis Terhadap Fragmen Carita Parahyangan: Naskah Sunda Kuno Abad XVI Tentang Gambaran Sistem Pemerintahan Masyarakat Sunda. *Jurnal Sosiohumaniora*, 2(3), 57–63.
- Darsa, U. A., Sumarlina, E. S. N., & Permana, R. S. M. (2020). Existence of Sundanese Manuscripts as a Form of Intellectual Tradition in the Ciletuh Geopark Area. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 8(2), 259–278. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v8i2.369>
- Ekadjati, E. S., & Darsa, U. A. (2007). *Kosmologis Sunda*. Pusat Studi Sunda.
- Permana, R. S. M. (2015a). Makna Tri Tangtu Di Buana yang mengandung aspek komunikasi politik dalam Fragmen Carita Parahyangan. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 3(2), 173–191. <https://doi.org/10.24198/jkk.vol3n2.8>
- Permana, R. S. M. (2015b). MAKNA TRI TANGTU DI BUANA YANG MENGANDUNG ASPEK KOMUNIKASI POLITIK DALAM FRAGMENT CARITA PARAHYANGAN. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 3(2), 173–191. <https://doi.org/10.24198/jkk.vol3n2.8>
- Permana, R. S. M. (2016). Implementation of Tri Tangtu Di Buana Containing Political Communication Aspects in Baduy Indigenous Communities. In D. Mulyana, M. Gill, A. Emmett, H. Agustin, C. Priyatna, & J. Adiprasetyo (Eds.), *MAC Conference 2016: A Survival between Technological Development and Cultural Change* (p. 399). Unpad Press.
- Permana, R. S. M., Sumarlina, E. S. N., & Darsa, U. A. (2020). Konsep “Parigeuing” dalam konteks kepemimpinan dan komunikasi politik berdasarkan naskah Sunda kuno. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(2), 253–264. <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i2.25671>
- Sumarlina, E. S. N. (2012). Konsep Pemimpin dan Kepemimpinan yang terungkap dalam Skriptorium Kabuyutan Ciburuy. *Prosiding Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara*.
- Sumarlina, E. S. N. (2018a). *Kearifan Lokal Budaya Sunda dalam Media Massa Cetak Jilid 1 & 2*. PT. Raness Media Rancage.
- Sumarlina, E. S. N. (2018b). *Seni Budaya dan Kearifan Lokal*. PT. Raness Media Rancage.
- Sumarlina, E. S. N. (2019). *Etika Berpolitik dan Konsep Kepemimpinan dalam Naskah Sunda*. PT. Raness Media Rancage.
- Sumarlina, E. S. N., & Darsa, U. A. (2022). KERAJAAN SUNDA BIHARI DAN KIWARI BERBASIS NASKAH SUNDA KUNO. *KABUYUTAN: Jurnal Kajian Ilmu Sosial Dan Humaniora Berbasis Kearifan Lokal*, 1(2), 34–40. <https://ejournal.lintasbudayanusantara.net/index.php/kabuyutan/article/view/37>
- Sumarlina, E. S. N., Darsa, U. A., Permana, R. S. M., & Husen, I. R. (2021). BUTIR-BUTIR

- PANCASILA DALAM NASKAH SUNDA KUNO ABAD XVI MASEHI. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 23(3), 307–312. <https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/24420>
- Sumarlina, E. S. N., Darsa, U. A., Permana, R. S. M., Husen, I. R., & Kodri, M. A. Al. (2020). Medical Texts as a Factor to Store Factual Information for the XVI Century AD in the Prevention of COVID-19 Pandemic. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 2661–2669. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201225>
- Sumarlina, E. S. N., & Maulidyawati, A. S. (2021). *Mengenal Kearifan Lokal Budaya Sunda dalam Perspektif Multidisiplin*. PT. Raness Media Rancage.
- Sumarlina, E. S. N., & Maulidyawati, A. S. (2022). *Ajen Inajen Budaya Sunda Kiwari & Bihari* (R. S. M. Permana (ed.)). PT. Raness Media Rancage. <https://ranessmediarancage.wordpress.com/2022/08/05/ajen-inajen-budaya-sunda-kiwari-bihari/>
- Sumarlina, E. S. N., & Permana, R. S. M. (2019). Komunikasi Politik dan Budaya Damai di Zaman Galuh Pakuan dalam Konstelasinya di Masa Kini. *LOKABASA: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Budaya Daerah Serta Pengajarannya*, 10(1), 34–42. <https://doi.org/10.17509/jlb.v10i1.16930>
- Sumarlina, E. S. N., Permana, R. S. M., & Darsa, U. A. (2020a). Tata Ruang Kosmologis Masyarakat Adat Kampung Naga berbasis Naskah Sunda Kuno. *LOKABASA*, 11(1), 22–28. <https://doi.org/10.17509/jlb.v11i1.25163>
- Sumarlina, E. S. N., Permana, R. S. M., & Darsa, U. A. (2020b). The Role of Sundanese Letters as the One of Identity and Language Preserver. In K. Saddhono, L. Muliastuti, K. A. Tawandorloh, C. A. Woodrich, & S. Briggs (Eds.), *Proceedings of the 2nd Konferensi BIPA Tahunan by Postgraduate Program of Javanese Literature and Language Education in Collaboration with Association of Indonesian Language and Literature Lecturers, KEBIPAAN, 9 November, 2019, Surakarta, Central Java*, In (pp. 1–7). EAI. <https://doi.org/10.4108/eai.9-11-2019.2295037>
- Suryalaga, H. R. H. (2009). *Kasundaan Rawayan Jati*. Yayasan Nur Hidayat.
- Thoha, M. (2013). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Widyonugrahanto, Herlina, N., Zakaria, M. M., Mahzuni, D., Sofianto, K., & Darsa, U. A. (2017). The politics of the Sundanese Kingdom administration in Kawali-Galuh. *Paramita - Historical Studies Journal*, 27(1), 28–33. <https://doi.org/10.15294/paramita.v27i1.9187>